

**BAHASA KRITIK MOCHTAR LUBIS: ANALISIS WACANA KRITIK
TAJUK RENCANA KORUPSI PADA HARIAN *INDONESIA RAYA* (1966-1974)**

Dadang S. Anshori

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia
dadanganshori@upi.edu

ABSTRAK

Kritik menjadi fenomena sosial yang menarik dalam kehidupan demokrasi. Namun, seringkali kritik menjadi masalah dalam relasi komunikasi sosial, terutama dalam hubungan dengan politik kekuasaan negara. Dalam penelitian ini kritik dipandang sebagai formula dalam menegakkan kontrol sosial terhadap pelanggaran kekuasaan. Kritik Mochtar Lubis yang menjadi objek penelitian ini merupakan fenomena demokrasi pers dengan relasi kekuasaan di awal Orde Baru (1966-1974). Fokus kajian dilakukan pada aspek bahasa kritik yang termuat dalam tajuk *Indonesia Raya* bertopik korupsi dan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahasa kritik Mochtar Lubis hendak membangun transformasi komunikasi budaya kritik melalui penggunaan bahasa yang sederhana, terus terang, tidak ambigu, jauh dari eufemisme dan akronim yang dapat menyampaikan informasi secara jujur dan mewujudkan penggunaan bahasa yang jauh dari akar feodalisme. Frasa ideomatik “republik pisang” dan “pengusaha oktopus” serta kosakata sarkasme “negara garong”, “tauke” “penggarongan di siang bolong”, “gerombolan kaum koruptor”, “bandit”, dan “cukongisme” digunakan untuk menajamkan maksud kritik. Konstruksi kalimat kritik yang digunakan berbentuk pasif sehingga objek kritik disebutkan secara jelas. Mochtar Lubis juga menggunakan konstruksi kritik pengalaman langsung dan contoh, konstruksi analogi, perbandingan, dan perumpamaan, konstruksi objek secara langsung, dan konstruksi *vis a vis* kritik. Semua konstruksi kritik tersebut bermuara pada kritik yang tajam, terang, dengan bahasa yang mudah dicerna.

Kata kunci: bahasa kritik, tajuk rencana, demokrasi, *Indonesia Raya*

ABSTRACT

Criticism becomes an interesting social phenomenon in democracy. But in really often criticism becomes a problem in social communication relations, especially in relationships in the politics of state power. In this study criticism is seen as a formula in enforcing social control over power violations. Criticism Mochtar Lubis which become the object of this research is a phenomenon of press democracy with power relations at the beginning of the new order (1966-1974). The focus of the study was conducted on the aspects of criticisms language contained in the Indonesia Raya editorial of corruption and economy topical. The results of the analysis show that the criticism language Mochtar Lubis wants to build a communication transformation of cultural criticism through the use of simple language, frankly, unambiguously, away from euphemisms and acronyms that can convey information honestly and realize the use of language far from roots of feudalism. The ideomatic phrase “banana republic” (“republik pisang”) and “intrepreneur octopus” (“pengusaha oktopus”) and vocabulary of “robber of state” (“negara garong”), “tauke”, “theft in broad dayligh” (“penggarongan di siang bolong”), “gang of corrupt” (“gerombolan kaum koruptor”), “bandit”, and “cukongisme” used to sharpen the intention of critic. Construction of critical sentences used passively so that the object of criticism is mentioned clearly. Mochtar Lubis also uses the construction of direct experience criticism and examples, the construction of analogies, comparisons, imagery, construction of object directly, and construction vis a vis criticism. All of the construction of the criticism leads to a sharp and bright criticism with easily digestible language.

Keywords: criticism language, editorial, democracy, *Indonesia Raya*

1. Pendahuluan

Kritik menjadi kebutuhan di alam demokrasi sebagai ruang untuk melakukan kontrol terhadap berbagai pihak, termasuk kekuasaan yang menyimpang dari nilai ideal dan konsensus hukum. Bagi Blum (2013) demokrasi Amerika, misalnya mengandung banyak cacat karena akses ekonomi hampir 40 persen dikuasai hanya oleh segelintir kecil elit superkaya Amerika (tidak lebih dari satu persen). Demokrasi Amerika hanya menjustifikasi perlindungan terhadap kelompok elit superkaya karena didasarkan pada argumen bahwa besaran pendapatan sebagai bagian dari perwujudan produktivitas. Sementara mereka yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan dipandang tidak produktif dan tidak kontributif terhadap negara karena berpendapatan rendah sehingga tidak punya akses untuk mengubah hidup mereka. Kapitalisme ekonomi Amerika kini menimbulkan banyak persoalan mendasar yang bermuara pada kesenjangan antarkelompok masyarakat Amerika.

Sesungguhnya kritik dan kritik sosial merupakan budaya pengkajian ilmiah atau penilaian terhadap masyarakat dalam suatu waktu tertentu (Susanto, 1977). Sebagai sebuah kajian ilmiah kritik sosial memiliki cara kerja ilmiah yang lazim dilakukan para peneliti dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan keilmuan. Pandangan ini selaras dengan pengertian kritik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Sugono dkk., 2008:742), yaitu kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Namun, dalam praktiknya, kritik seringkali menimbulkan masalah, terutama dalam ranah politik apabila disampaikan dengan cara yang kurang tepat, terutama dalam hal penyampaian dan penggunaan bahasa kritik. Kritik tidak jarang menghasilkan permusuhan dan berujung pada tuntutan di pengadilan. Beberapa fenomena kritik yang dibuat dalam bentuk *meme* di media sosial dilaporkan pihak yang dikritik karena dianggap sudah masuk ke ranah pribadi dan mencemarkan nama baik sehingga berpotensi melanggar UU ITE. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadinya dekonstruksi makna kritik sosial dalam penggunaannya di masyarakat. Semua pihak mafhum bahwa kritik yang baik disampaikan melalui bahasa yang santun, namun banyak pihak yang melihat kritik hanya dari cara penyajiannya, tidak melihat bagaimana isi atau substansi kritik. Kritik tidak selalu enak didengar atau penyajiannya sesuai dengan kehendak pihak yang dikritik, terutama kritik di ruang publik atau pada perdebatan terbuka.

Budaya dan gaya mengkritik dapat bersifat personal, komunal, atau institusional. Kritik personal terjadi karena masing-masing orang memiliki cara penyampaian gagasan yang berbeda-beda. Kritik personal sangat bergantung pada karakter individual masing-masing orang. Kritik komunal dimungkinkan terjadi pada satu kelompok masyarakat tertentu yang memiliki cara dan pandangan yang homogen, biasanya direpresentasi dengan cara bertutur (berkomunikasi) yang relatif sama. Gaya bertutur sebuah etnis dalam mengkritik dapat dibedakan dengan budaya etnik lainnya, sesuai dengan nilai budaya yang dianut etnis tersebut. Sementara kritik institusional terjadi karena lembaga memiliki pakem atau cara sendiri dalam menyampaikan kritik yang diwakili oleh pihak-pihak yang dipandang representasi dalam lembaga. Setiap aparat pemerintah memiliki pakem untuk menjaga wibawa pemerintah, termasuk dalam melakukan kritik, berbeda dengan lembaga pers yang berdiri independen dan tidak berpihak selain pada kepentingan masyarakat. Demikian pula ketika para aparat pemerintah menerima kritik harus dipahami sebagai arus balik dari komunikasi dua arah dengan masyarakat (Dahlan, 1977). Bahkan mungkin harus dipandang sebagai risiko menjadi pejabat pemerintah.

Kritik juga ditentukan dimensi media yang digunakan sebagai medium kritik. Pada masyarakat yang menganut paham demokrasi, kritik menjadi santapan harian dan biasa disampaikan secara terbuka, berbeda dengan pada masyarakat feodal yang lebih kebal kritik. Kritik pada masyarakat demokratis bahkan disampaikan pada media massa secara terbuka dibaca dan dikonsumsi masyarakat dunia. Akan tetapi, di negara feodal dengan sistem kerajaan, pers tidak bisa bebas melakukan kritik terhadap sistem kerajaan apabila ingin tetap terbit. Oleh karena itu, semakin demokratis suatu bangsa akan semakin terbuka atas hadirnya kritik. Untuk menjadi negara

yang demokratis, pemerintah dan masyarakat harus siap terbuka terhadap kritik. Sekalipun negara menyatakan demokratis, tetapi apabila pemerintah antikritik dan membungkam kritik, maka sulit bagi negara itu untuk disebutkan sebagai negara demokratis. Di negara demokratis, kritik berarti kesiapan pemerintah dan masyarakatnya untuk menerima perbedaan dan siap hidup berdampingan dengan perbedaan serta secara sportif mengakui perbedaan tanpa menghadirkan permusuhan.

Namun demikian, kritik berkait pula dengan budaya masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki gaya dan etika dalam melakukan kritik. Dengan demikian, kritik yang berbudaya adalah kritik yang mempertimbangkan aspek budaya dalam penyajiannya. Kritik yang berbudaya akan disampaikan dengan budaya komunikasi yang dibangun dalam masyarakatnya. Dengan variasi budaya yang demikian kompleks, dalam masyarakat Indonesia kritik harus benar-benar diselaraskan dengan tradisi dan nilai yang dianut masyarakat masing-masing etnis. Demikian pula, budaya kritik pada masyarakat demokratis dalam praktiknya harus memperhatikan unsur-unsur budaya lokal yang berlaku dalam sebuah kelompok masyarakat.

Budaya kritik juga dibangun oleh kultur birokrasi pemerintah dalam membangun komunikasi dengan rakyatnya. Pada setiap periode pemerintahan, persepsi terhadap kritik berbeda-beda. Pada masa pemerintahan liberal Orde Lama, kritik dilakukan secara terbuka dengan berbagai media yang ada. Kritik yang disampaikan Mochtar Lubis, pimpinan redaksi harian *Indonesia Raya*, merupakan cermin kondisi demokrasi yang tumbuh pada masanya (Atmakusumah dan Atmakusumah, 1997). Mochtar Lubis bahkan dijuluki sebagai pelopor kebebasan pers, karena keberanian menjadikan *Indonesia Raya* sebagai media kritik terhadap berbagai pelanggaran kekuasaan. Mempelajari bagaimana kritik disampaikan Mochtar Lubis pada saat itu, menjadi pelajaran bagi para pihak yang menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Kita mengetahui bagaimana hubungan para elit politik pada masa itu yang keras namun tetap saling menghormati dan menjalin persahabatan. Kerasnya kehidupan politik pada saat itu, menyebabkan beberapa elit politik masuk penjara karena perbedaan pandangan, tetapi tetap menjaga hubungan pribadi yang harmoni. Kisah bagaimana hubungan baik antara Buya Hamka dengan Soekarno, sekalipun Buya Hamka pernah dipenjara tanpa proses hukum oleh Soekarno, namun Buya Hamka yang mengimami salat jenazah Soekarno. Demikian pula hubungan antara Mochtar Lubis, sekalipun pernah dipenjarakan Soekarno tanpa proses pengadilan, tetap menyampaikan belasungkawa dan rasa berdukanya pada saat meninggalnya Soekarno (Atmakusumah dan Atmakusumah, 1997). Mereka merupakan para tokoh yang berjiwa besar dan mampu membedakan antara urusan pribadi dengan urusan politik.

Pada saat ini, demokrasi menjadi tantangan paling berat sekaligus peluang paling besar yang harus dihadapi masyarakat Indonesia. Namun, bagaimana memosisikan demokrasi terlihat dari bagaimana para elit dan masyarakat bangsa ini menghadapi kritik. Apabila elit politik mudah melaporkan pihak yang dianggap mengkritik dan menilai kritik dari sudut pencemaran nama baik, maka bukan tidak mustahil bahwa fenomena itu merupakan bentuk atau perilaku ketidaksiapan kita menjadi masyarakat demokratis. Justru pada saat media massa dan jaringan internet masuk ke desa-desa, kita harus siap menerima kenyataan heterogenitas kehidupan, termasuk di dalamnya kompleksitas kritik.

Peran signifikan Mochtar Lubis dalam membangun budaya kritik di Indonesia mendapat banyak perhatian dari pemikir Barat maupun dalam negeri. Beberapa penelitian tentang kiprahnya mengaitkan Mochtar Lubis sebagai seorang jurnalis, penulis, dan budayawan yang telah memberi warna dalam budaya kritik politik di Indonesia (Semma, 2008; Hill, 2011). Dalam pandangan Hill (2011: 4) Mochtar Lubis adalah eksponen paling signifikan dan kontroversial dalam kehidupan demokrasi pada masa Orde Lama. Kiprahnya di bidang pers dan idealismenya yang tak pernah takut dalam mengelola pers diakui sebagai orang yang tidak kompromi dengan berbagai bentuk pelanggaran kekuasaan. Kritiknya disalurkan melalui tajuk rencana *Indonesia Raya* dengan bahasa yang lugas dan bernas. Mochtar Lubis digambarkan sebagai seorang perantara budaya yang fasih, pengarang pemenang penghargaan, dan wartawan terkenal secara internasional. Dia adalah

pengkritik dengan suara lantang baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, menetapkan dirinya sebagai lambang kebebasan pers Indonesia. Sementara itu, menurut Semma (2008) pandangan Mochtar Lubis tentang negara dan korupsi menunjukkan bahwa ia secara kritis mendorong transformasi budaya politik dan budaya antikorupsi dalam bernegara. Bagi Semma (2008) Mochtar Lubis diasumsikan sebagai tokoh Indonesia yang cukup representatif mewakili pemikiran budaya politik kritis yang telah terwariskan kepada sejumlah penulis, jurnalis, dan budayawan kritis di Indonesia.

Pada umumnya, kajian tentang kritik Mochtar Lubis menitikberatkan pada kajian wacana kritis tentang kritik kekuasaan dan pendalaman semiotik sebagai simbol kritik dalam berbagai karya, baik karya sastra maupun jurnalistik (Anshori, 2017). Dari sudut pandang kajian tersebut, pemikiran Mochtar Lubis menjadi pencerah dalam dimensi sosial dan kekuasaan. Namun satu aspek yang belum disentuh para peneliti adalah bahwa pandangan kritis Mochtar Lubis disampaikan melalui bahasa yang kritis pula. Bahasa kritik yang digunakan Mochtar Lubis menjadi kajian penting, bukan hanya bagaimana warna bahasa yang digunakan tetapi bagaimana formula bahasa yang mewakili pemikiran kritis Mochtar Lubis. Terlebih dalam hal bahasa, Mochtar Lubis juga memiliki pemikiran yang kritis, terutama terhadap penggunaan bahasa oleh para pejabat negara. Pandangannya yang kritis tentang komunikasi yang harus dilakukan dengan bahasa secara jernih agar dapat ditangkap dengan baik oleh masyarakat (Lubis, 1989). Hal yang dianggap mengganggu dalam komunikasi di Indonesia adalah gejala eufemisme dan akronim dalam berbahasa yang berakar dari sikap feodalisme dan kemalasan berbahasa. Hal lain yang mendapatkan kritik Mochtar Lubis adalah ketidakjujuran informasi yang diberikan kepada masyarakat akibat adanya eufemisme sehingga makna yang hendak dihadirkan dalam komunikasi menjadi kabur dan tidak dipahami dengan baik. Eufemisme dalam praktiknya digunakan sebagai alat untuk mengabutkan fakta dan menyembunyikan data sesungguhnya. Pemikiran kritis Mochtar Lubis tersebut sesuai dengan tesis bahwa seseorang dalam berkomunikasi pada umumnya diwakili dengan pemilihan bahasa yang merepresentasi ideologinya (Hodge dan Kress, 1993; Anshori 2017). Demikian pula, perkembangan bahasa tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial budaya masyarakat penggunaannya (Suprpto, 1989). Pendekatan wacana kritis dalam konteks ini tidak dapat dipisahkan dari pendekatan linguistik sebagai simbol dan medium transformasi kekuasaan, baik dalam bentuk dominasi maupun hegemoni (Anshori, 2017). Melalui cara berpikir inilah penelitian ini memiliki signifikansi dengan ikhtiar masyarakat Indonesia yang tengah memaknai dan membangun kritik demokrasi sesuai kultur dan konteksnya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kualitatif terhadap data-data bahasa tulis tajukrencana harian *Indonesia Raya* yang terkumpul dalam buku *Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya, Seri 2 Korupsi dan Ekonomi, Pendidikan dan Generasi Muda, Hukum, dan ABRI* yang disunting Atmakusumah dan Atmakusumah, S.R pada 1997 dan diterbitkan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Tajuk ini ditulis Mochtar Lubis sebagai pimpinan redaksi harian *Indonesia Raya* pada 1966 s.d. 1974 pada saat Indonesia memasuki awal Orde Baru dan hubungan pers dengan negara sedang memasuki masa harmoni (periode bulan madu). Dengan demikian, data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap topik korupsi dan ekonomi. Melalui kajian topik korupsi, penelitian ini menunjukkan bahwa masalah korupsi menjadi topik penting sepanjang Indonesia berdiri. Topik penelitian ini diselaraskan dengan isu kontekstual yang tengah terjadi di masyarakat saat ini sehingga relevan untuk mengkonformasikan bentuk wacana kritik yang terjadi pada masa lalu. Pada topik korupsi dan ekonomi yang sudah terpilih terdapat 243 judul tajuk yang menjadi data penelitian ini. Analisis penelitian difokuskan pada masalah bahasa, mencakup penggunaan kosakata, frasa, konstruksi kalimat, dan penggunaan substansi bahasa kritik dalam mentransformasi pemikiran Mochtar Lubis. Melalui penggunaan unsur bahasa, penelitian ini akan mampu mengungkapkan strategi komunikasi tulis Mochtar Lubis dalam

menyampaikan kritik. Prosedur penelitian dilakukan melalui langkah penentuan topik, seleksi bahasa, analisis bahasa, tafsir pemaknaan bahasa, dan tafsir pesan yang disampaikan melalui bahasa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penggunaan kosakata dan Frasa

Secara umum, dalam menyampaikan kritik Mochtar Lubis dalam tajuk *Indonesia Raya* menggunakan bahasa dengan kosakata yang sederhana, mudah dipahami, praktis, ringan, dan terang maksudnya. Dari sebanyak 243 judul tajuk bidang korupsi dan ekonomi yang dianalisis nyaris tidak ada penggunaan eufemisme dan akronim, bahasanya terang benderang, maknanya tidak ambigu dan jelas arah sasaran kritik yang disampaikan. Namun demikian, sekali-kali Mochtar Lubis menggunakan istilah asing atau bahasa daerah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Istilah asing yang digunakan misalnya kosakata *schorsing*, *out of date*, *maximize profits*, *maximize talent*, *kattebellletje*, *vested interest*, *assembling*, *made in Japan*, *joint ventures*, *kickback*, *community projects*, *supplier*, *hantam kromo*, *oil boom*, *bill of lading*, *social distortion*, *opportunities beginsel*, *alon-alon asal kelakon*, *conservation of oil resources* dan lain-lain yang pada umumnya bersifat teknis bidang ekonomi untuk menjelaskan konsep atau maksud dari tajuk. Dari segi kuantitas, istilah asing yang digunakan sangatlah minim, bahkan banyak tajuk yang ditulis bersih dari istilah asing. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Mochtar Lubis merupakan budayawan yang sangat peduli dengan bahasa Indonesia dan banyak melakukan kritik terhadap pejabat yang serampangan dalam berbahasa Indonesia, terutama dalam hal pemakaian eufemisme dan akronim. Oleh karena itu, dalam tajuk-tajuk harian *Indonesia Raya*, tak akan dijumpai eufemisme dan akronim, kritik yang terus terang membutuhkan bahasa yang terus terang.

Kosakata dan frasa yang digunakan mencerminkan ketajaman kritik yang disampaikan. Apabila kosakata dapat merepresentasi pemikiran penggunanya, maka kosakata yang dipakai Mochtar Lubis dapat dikatakan sebagai gambaran pikirannya yang lurus dan tajam. Setiap yang dipikirkannya disampaikan tanpa ada rasa ketakutan dengan bahasa yang hampir semua pembaca mudah memahaminya. Penggunaan kosakata “bandit” pada kutipan tajuk berikut, misalnya menunjukkan nyali seorang Mochtar Lubis yang luar biasa besar.

Bandit Coopa Arief Husni secara diam-diam dibebaskan dari tahanan dalam oleh Kejaksaan Agung. Ketika ditanya wartawan *Indonesia Raya*, Jaksa Agung Muda Ali Said meminta wartawan kami menanyakan kepada Jaksa Agung Soegih Arto. Ketika sampai pada Soegih Arto, Jaksa Agung mengoper lagi pada Ali Said (“Amat Memilukan Hati”, 17 April 1970).

Bahasa kritik yang langsung ke sasaran kritik sudah tampak sejak membaca judul-judul tajuk rencana harian *Indonesia Raya*, seperti “wajah Indonesia Dirusak Terus”, “Bulog, benteng yang Kebal?” “Baik juga Jepang Diperingatkan”, “Masalah Pertamina” “Mentalitas Wartawan yang Bejat”, “Pura-pura Tak Mengerti, Jenderal Ibnu?”, “Apa Arti Negara Garong”, “Jangan Jadi “Republik Pisang”, “Mengurus Perut Rakyat Biar Lebih Terencana”, dan lain-lain. Judul-judul tersebut langsung menohok pada masalah dan pihak yang menjadi objek kritik. Untuk masalah Pertamina, misalnya Mochtar Lubis menurunkan tajuk secara beruntun dan seperti tidak bosan menyerah, yang salah satu tajuk hanya berisi dua pertanyaan kritik dalam judul “Pertanyaan Sederhana pada Pertamina” (3 Desember 1969). Isi tajuk tersebut sebagai berikut.

*Mengapa Pertamina lebih suka memesan kapal lewat Robin Loh dan **tidak membeli langsung** pada pabrik kapal atau membuka tawaran umum?

*Siapa yang mendapat **komisi pembelian** kapal serupa ini?

Cukuplah hari ini dengan dua pertanyaan. Kami yakin pertanyaan-pertanyaan ini tidak sukar dijawab oleh Hubungan Masyarakat Pertamina.

Tajuk di atas bersifat kritik langsung tanpa basa-basi, menghujam pada masalah utama kritik dan ditulis dengan bahasa yang sederhana, tidak digunakan istilah yang berat karena hampir semua kosakata yang ditulis dapat dipahami oleh pembaca. Dua pertanyaan tajuk tersebut membuka kondisi borok yang dilakukan Pertamina masa itu, pembelian kapal tanpa tender dan adanya praktik

korupsi dalam pembelian kapal tersebut. Istilah “tidak membeli langsung” dan “komisi pembelian” menjadi istilah kunci dalam praktik korupsi. Pada umumnya korupsi terjadi karena tidak terbukanya proses lelang yang memunculkan adanya suap (komisi) dalam pengadaan yang tidak terbuka tersebut. Istilah “pembelian” pada waktu itu lebih membumi daripada istilah “pengadaan” karena bersifat praktis transaksional dalam membeli barang dari pihak luar.

Dengan menganalisis kosakata bahasa tajuk Indonesia Raya, dapat dikemukakan tesis bahwa ketajaman kritik berkorelasi dengan kesederhanaan bahasa yang digunakan. Kritik yang tajam dicerminkan dengan bahasa yang sederhana, dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari, tidak ambigu, dan tidak mengandung eufemisme. Karakter komunikasi kritik semacam inilah yang dikembangkan Mochtar Lubis yang dapat digambarkan melalui penggunaan kosakata. Oleh karena itu, tidak banyak kosakata kunci yang terasa asing atau unik dalam tajuk Indonesia Raya. Hanya terdapat beberapa kosakata dan frasa yang menggambarkan tingkat kekritisannya dan simbol kekritisannya dengan analogi dan perumpamaan yang relevan dengan maksud agar kritik lebih memiliki daya sengar. Penggunaan analogi “republik pisang” dan “pengusaha oktopus” contoh frasa ideomatik yang digunakan Mochtar Lubis agar pembaca paham bagaimana kondisi korupsi dan ekonomi Indonesia pada masa itu. Selain itu, kosakata yang digunakan tampak sarkasme dan menunjukkan “kemarahan” seorang Mochtar Lubis, misalnya kosakata “negara garong”, “tauke” “penggarongan di siang bolong”, “gerombolan kaum koruptor”, “bandit”, dan “cukongisme”. Beberapa kosakata kunci dimaksud sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1: Kosakata dan Frasa Kunci Kritik Mochtar Lubis

Sumber Data	Kosakata dan Frasa Kunci
Tajuk Rencana Masalah Korupsi dan Ekonomi	wajah Indonesia, rezim Soekarno, komisi pembelian, perampokan negara, korupsi, tauke, hubungan khusus, republik pisang, kebudayaan korupsi, resolusi antikorupsi, negara garong, pengamanan operasi korupsi, buah tindak korupsi, operasi sapu, penggarongan di siang bolong, gerombolan kaum koruptor, bandit, debirokratisasi, cukongisme, perut rakyat, manipulator, pengusaha oktopus

Kosakata dan frasa di atas merupakan rangkaian pemikiran Mochtar Lubis dalam memerangi korupsi dan keserakahan penguasa yang memperkaya diri dengan memanfaatkan kekuasaannya. Kosakata dan frasa “perampokan negara”, “negara garong”, “penggarongan di siang bolong”, “gerombolan kaum koruptor”, “pengusaha oktopus”, dan “bandit” merupakan istilah yang demikian kasar dan keras yang dipakai Mochtar Lubis untuk menyebut pelaku korupsi yang merugikan negara dan rakyat Indonesia. Demikian pula “rezim Soekarno” selalu disebut sebagai pembanding kondisi buruk yang pernah dialami dan tampak dibenci Mochtar Lubis. Melalui penggunaan kosakata tersebut kita dapat membaca pemikiran Mochtar Lubis yang kritis dan terus terang tanpa rasa takut untuk membuka “wajah Indonesia”.

3.2 Penggunaan Konstruksi Kalimat

Selain dapat dianalisis melalui penggunaan kosakata, bahasa kritik Mochtar Lubis akan tampak sangat jelas apabila dicermati dalam konstruksi kalimat. Bagaimanapun kalimat memiliki kemampuan untuk menghimpun makna yang lebih jelas dan utuh sesuai dengan pesan penuturnya. Beberapa kalimat kunci yang digunakan Mochtar Lubis dalam *Indonesia Raya* dapat ditemukan dalam konteks penyimpulan kasus atau pembanding kasus, seperti pada kalimat berikut.

- (1) Akan tetapi, perlakukan serupa ini jelas amat merusak nama baik dan **wajah Indonesia** di mata tamu luar negeri kita.
- (2) Akan tetapi, selama **rezim Soekarno** prosedur yang objektif dan benar ini telah dibuang ke laut.
- (3) Semuanya ini tentu saja dapat dilakukan dengan **membayar komisi** yang cukup lumayan, baik pada perantara maupun pada Soekarno sendiri.

Kalimat (1) menegaskan bahwa berbagai perilaku yang kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah yang terjadi di lapangan, akan menyebabkan buruknya citra Indonesia di mata luar negeri. Mochtar Lubis menggunakan istilah “wajah” untuk mewakili seluruh kondisi yang hendak dijaga dalam sebuah negara. Istilah ini sangat tepat digunakan karena apa pun yang terjadi dalam tubuh manusia, maka kita dapat melihat dari ekspresi wajah manusia tersebut. Dengan kata lain, wajah merupakan representasi kondisi fisik manusia yang dianalogikan dalam sebuah negara dengan perilaku pejabat atau pengelola negara tersebut. Sementara itu, kalimat (2) dimaknai sebagai perbandingan dari beragam kasus yang terjadi saat itu, dengan peristiwa pada masa pemerintahan Soekarno, yang dalam bahasa kritik Mochtar Lubis disebut rezim. Kalimat ini mengandung kritik yang terang benderang dengan analogi “dibuang ke laut” untuk menggambarkan betapa negeri ini, pada saat itu, tidak menggunakan prosedur yang benar dalam mengelola pembelian barang dari luar negeri. Semua sepaham bahwa frasa ideomatik “dibuang ke laut” artinya sesuatu yang dianggap tidak berharga atau tidak dianggap penting. Praktik tidak benar tersebut tampak dijelaskan pada kalimat (3) dengan frasa kunci “membayar komisi”. Konstruksi kalimat kritik lebih banyak digunakan dalam bentuk aktif, hal ini berimplikasi pada munculnya subjek atau pelaku yang dikritik secara langsung, sebagaimana kalimat (1) dan (3). Namun demikian, tidak semua subjek atau pelaku yang dikritik muncul dalam satu kalimat, karena dipaparkan secara panjang lebar dalam bentuk kasus pada kalimat sebelumnya.

(4) Yang harus dilindungi pemerintah ialah kepentingan dan penghidupan rakyat petani kopra yang terus menerus menjadi **sasaran pemerasan dan penipuan**.

(5) Kita harus dapat menghentikan **pencurian dan perampokan negara dan rakyat** lewat perbuatan korupsi oleh pejabat dan pemimpin.

Kalimat (4) merupakan konstruksi kalimat kritik yang memberikan solusi dan penegasan atas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam melindungi rakyat. Sementara itu, kalimat (5) berupa afirmasi kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menghentikan korupsi yang sering terjadi dilakukan oleh pejabat negara. Kalimat ini dengan jelas menyebut bahwa korupsi merupakan pencurian dan perampokan negara oleh pejabat. Konstruksi kalimat (5) bersifat aktif sehingga terang objek yang dikritik dalam kalimat tersebut.

(6) Berkat kepandaian main **hubungan khusus**, maka beberapa tauke perusahaan Mantrust telah berhasil mendapat pinjaman sebesar 2,638 miliar rupiah dari negara Indonesia, sedang beras “Tekad” yang dijanjikan akan diproduksi dengan sejumlah besar pinjaman ini, tak kunjung muncul.

(7) **Mismanajemen** yang luar biasa yang terjadi di Pertamina, **pengarongan devisa** negara oleh Coopa, manipulasi Mantrust, dan lain-lain adalah gejala-gejala keadaan sebuah **republik pisang** di mana pemerintah tidak berdaya menghadapi petualang-petualang di dalam dan luar negeri.

(8) Sudah lama ada pengusaha-pengusaha nonpribumi yang telah jadi siluman **pengusaha oktopus**.

Kalimat (6), (7), dan (8) merupakan kalimat kritik yang menggambarkan bagaimana proses korupsi terjadi pada masa itu dalam beberapa kasus. Korupsi tersebut terjadi karena adanya persekongkolan antara pengusaha dan pejabat. “Hubungan khusus” dan “pengusaha ortopus” merupakan praktik dari pengusaha agar memperoleh proyek dari pemerintah Indonesia. Sementara dari dalam terjadi “mismanajemen” yang mengarah pada “penggarongan devisa” sehingga Indonesia menjadi negara “republik pisang”, maksudnya pejabat negara bermain sendiri melakukan kegiatan usaha yang tidak diketahui pihak lain. Kalimat-kalimat di atas demikian jelas dan terang menggambarkan kritik yang disampaikan Mochtar Lubis. Kritik ini bukan saja lugas tetapi sudah mengarah pada bentuk kalimat sarkasme dengan menggunakan frasa yang kasar dan analogi.

(9) Baiklah diingat kembali oleh golongan-golongan yang menolak komunisme sebagai suatu sistem kemasyarakatan di negeri kita bahwa jika **kebudayaan korupsi** tidak dilenyapkan, maka yang akan timbul pasti satu **kebudayaan komunis**.

Pada kalimat (9) kritik Mochtar Lubis bersifat umum dan bermuatan ideologis, mengingat pada saat itu, Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh pemikiran Orde Lama, terutama komunisme. Mochtar Lubis dalam banyak kritiknya membandingkan kondisi masa itu dengan

kondisi sebelumnya pada masa rezim Soekarno. Paham komunisme yang sempat tumbuh di masa rezim Soekarno menjadi objek kritik yang senantiasa muncul dalam bentuk perbandingan, termasuk terjadi saat ini. Merajarelayanya korupsi yang dilakukan pejabat negara dikhawatirkan menjadi sebuah “kebudayaan korupsi” yang diperbandingkan nilainya dengan “kebudayaan komunis”. Dengan kata lain penolakan bangsa kita terhadap komunis seharusnya sama selaras dengan penolakan terhadap korupsi.

3.3 Relasi Bahasa dan Substansi Kritik

a. Konstruksi Pengalaman dan Contoh

Apabila dikaji berdasarkan relasi bahasa dengan substansi kritik, terdapat beberapa variasi dari pola kritik yang digunakan Mochtar Lubis. Kritik didasarkan pada pengalaman dan contoh langsung yang relevan dengan masalah yang dikritik. Pengalaman atau contoh langsung tidak jarang dijadikan sandaran atau pijakan untuk melakukan kritik terhadap persoalan yang lebih besar. Dengan cara ini kritik dilakukan lebih faktual dengan data-data yang akurat, tidak sekadar opini Mochtar Lubis. Contoh konstruksi bahasa kritik yang menggunakan pengalaman langsung sebagai berikut.

“Beberapa hari yang lalu seorang kenalan kami, seorang pengusaha luar negeri, telah datang berkunjung ke Indonesia. Dia datang untuk mengurus suatu pembelian peralatan besar oleh sebuah perusahaan negara di Sumatera. Dia datang naik pesawat MSA pada hari Selasa tanggal 17 Desember 1968 yang lalu. Ketika menghadapi pemeriksaan imigrasi, dia telah diajak oleh seorang pejabat ke sebuah kamar yang kecil, dan di sana dia diminta membayar dua puluh dolar Singapura. Dia menolak membayar karena dia telah membayar segala ongkos visi yang diperlukan di luar negeri (“Wajah Indonesia Dirusak Terus”, 30 Desember 1968).

Tajuk di atas dijadikan pengantar untuk mengkritik pelanggaran yang dilakukan aparat negara yang bertentangan dengan politik penanaman modal asing yang tengah digemborkan pemerintah pada saat itu. Prilaku ini menurut Mochtar Lubis dapat menggagalkan semua bentuk penjelasan atau citra tentang kondisi Indonesia agar dipercaya luar negeri. Dalam tajuk di atas, pengalaman bersifat personal, namun karena dianggap substantif dijadikan rujukan untuk kritik institusional yang lebih besar.

Contoh lain strategi kritik melalui pengalaman langsung yang bersifat personal termuat dalam kutipan tajuk berikut.

Kawat yang diterima oleh harian *Indonesia Raya* untuk diteruskan kepada Presiden Soeharto dan Menteri Perdagangan dari Saudara Anwar Djaafara di Gorontalo mengandung suatu jeritan hati rakyat daerah yang menderita akibat perlakuan sewenang-wenang penguasa setempat. Kawat itu merupakan pula satu keberanian karena ada penguasa di daerah yang mudah menyalahgunakan kekuasaan mereka terhadap orang yang tak mereka senangi. Tak mungkin kawat sepanjang itu, yang begitu mahal ongkosnya, dikirim hanya untuk main-main (“Perlindungan bagi Rakyat Petani”, 1 Februari 1969).

b. Konstruksi analogi, perbandingan, dan perumpamaan

Strategi kritik juga dilakukan dengan analogi, perbandingan, dan perumpamaan langsung pada objek pembanding langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya objek yang dibandingkan adalah kehidupan sosial yang dialami masyarakat pada masa itu. Contoh kritik berikut menggambarkan analogi, perbandingan, dan perumpamaan tersebut.

“... Di Eropa Barat, Amerika, Kanada, Australia, dan New Zealand, umpamanya, air buah kaleng yang diminum sang milyuner di rumahnya yang mewah dapat pula diminum jadi santapan pagi buruh pabrik. Roti, telur, daging, dan sebagainya yang dimakan mereka yang termasuk penghasilan kecil sama saja kualitasnya dengan yang dimakan mereka yang kaya (“Memakai Teknologi dan Ilmu”, 24 Januari 1969).

Kritik di atas hendak menggambarkan perbedaan kesenjangan yang terjadi di Indonesia dengan di luar. Kesenjangan hidup atau jurang antara si kaya dan si miskin diperkecil dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, sulitnya memperkecil

jurang kesenjangan ini karena terjadinya praktik rebutan kekuasaan dan harta dan terjadinya pencurian dan perampokan negara dan rakyat lewat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan pemimpin. Dimensi yang dibandingkan bukan pada hal yang makro, misalnya pendapatan perkapita, tetapi justru kebutuhan hidup (sandang) yang diperlukan masyarakat sehari-hari. Perbandingan ini sangat mendasar, karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berjibaku memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Bahasa kritik berpola analogi juga dapat ditemukan pada kutipan tajuk berikut.

Mismanajemen yang luar biasa yang terjadi di Pertamina, penggarongan devisa negara oleh Coopa, manipulasi Mantrust, dan lain-lain adalah gejala-gejala keadaan sebuah “republik pisang” di mana pemerintah tidak berdaya menghadapi petualang-petualang di dalam dan luar negeri (“Jangan Jadi “Republik Pisang”, 5 Januari 1970).

c. Konstruksi Objek Kasus

Konstruksi kritik langsung ke sasaran objek yang dikritik merupakan bentuk kritik yang lebih banyak digunakan Mochtar Lubis dalam menyampaikan kritik. Pola ini digunakan berkait dengan keberanian dalam melakukan kritik dan prinsip penggunaan bahasa yang terang dalam melakukan kritik. Dalam konstruksi kritik seperti ini tidak ada bahasa yang ambigu atau eufemisme, semuanya terbuka dan jelas sehingga maksud kritik dipahami pembaca dengan terang. Konstruksi kritik langsung tampak pada tajuk di bawah ini.

Kepala berita surat kabar selama beberapa hari terakhir penuh dengan cerita tentang korupsi yang bukan alang kepalang. Seorang direktur PT Bluntas terlibat perkara korupsi 850 juta. Soal-soal dana Mesjid Istiqlal meliputi sekian ratus juta lagi. Demikian seterusnya. Hingga timbul kesan, para koruptor sudah bertambah lihai dan begitu pandai menutup perbuatan korupsi mereka hingga tidak diketahui sampai perbuatan korupsinya mencapai jumlah ratusan juta (“Korupsi! Korupsi!”, 21 Februari 1969).

Tajuk ini selain langsung menyebut objek kritik juga menyebut nama lembaga yang bermasalah dan data besaran angka korupsi. Ini yang dimaksud dengan kritik yang terang dalam pemikiran Mochtar Lubis. Dalam beberapa tajuk data dan fakta inilah yang dijadikan sandaran kritik secara langsung, termasuk keberanian Mochtar Lubis mengambil risiko dari kritik yang dilakukannya. Pada umumnya kritik seperti ini disampaikan dalam tajuk yang memuat kasus-kasus pelanggaran, termasuk korupsi. Perhatikan kutipan tajuk lainnya yang berpola sama berikut ini.

Berkat kepandaian main hubungan khusus, maka beberapa tauke perusahaan Mantrust telah berhasil mendapat pinjaman sebesar 2,638 miliar perusahaan dari negara Indonesia, sedang beras “Tekad”, yang dijanjika akan diproduksi dengan sejumlah besar pinjaman ini, tak kunjung muncul (“Skandal Mantrust”, 19 September 1969).

Akan tetapi, selama rezim Soekarno prosedur yang objektif dan benar ini telah dibuang ke laut. Di kala itu, barang buruk sekalipun dapat dijual kepada pemerintah asal ada *kattebelletje* dari Soekarno. Atau penawaran-penawaran dapat dilakukan lewat Hartini, Sari Dewi, atau pembesar-pembesar yang dekat dengan Soekarno. Semuanya ini tentu saja dapat dilakukan dengan membayar “komisi” yang cukup lumayan, baik pada perantara maupun pada Soekarno sendiri (“Mana Sistem Tawaran Umum”, 4 Februari 1969).

d. Konstruksi *vis a vis* kritik

Dalam beberapa tajuk kritik Mochtar Lubis dilakukan bukan hanya terbuka, langsung ke sasaran, namun menantang secara (*vis a vis*) berhadapan pihak yang dikritik untuk membuktikan kebenaran dengan fakta dan data yang diyakinya. Dalam banyak kasus, tajuk *Indonesia Raya* mengundang respon balik dari pihak yang merasa dirugikan, terutama dalam kasus Pertamina. Namun, seperti tidak memiliki rasa takut, Mochtar Lubis menantang kepada pihak yang dikritik untuk membuktikan ketidakbenaran data dan fakta yang disajikan tajuk *Indonesia Raya*. Berikut kutipan tajuk yang mengandung kontruksi *via a vis* kritik.

Kita ingin, jika fakta dan data kami salah agar pimpinan Bulog membantahnya atau mengadakan Indonesia Raya ke depan pengadilan. Di samping tu, kita ingin pula melihat kejaksanaan bertindak

terhadap harian ini, jika harian ini menyiarkan berita yang tidak benar. Akan tetapi menindak mereka yang menyelewengkan, jika fakta dan data kami benar (“Bulog, Benteng yang Kebal?”, 13 Februari 1969).

Tajuk serupa dapat dibaca pada kutipan-kutipan berikut.

Kami sangat senang para mahasiswa mengatakan kepada Menteri Penerangan bahwa jika laporan-laporan Indonesia Raya mengenai penyelewengan-penyelewengan di Pertamina tidak benar, maka ini berupa fitnah dan mencemarkan nama baik Direktur Utama Ibnu Sutowo, dan sebaiknya Indonesia Raya diadukan ke pengadilan. Kami amat senang jika Ibu Sutowo menempuh jalan ini (“Mari ke Pengadilan”, 29 Januari 1970).

Tidakkah tiba waktunya kini bagi pemerintah dan DPR untuk menyusun panitia pemeriksa Pertamina? Harian *Indonesia Raya* bersedia untuk yang pertama-tama diperiksa, agar pada panitia yang demikian itu dapat kami sampaikan bukti-bukti mismanajemen yang merajalela selama ini dalam Pertamina (“Jangan Korban Pegawai Tak Berdosa”, 22 Desember 1969).

Konstruksi kritik seperti ini dilakukan Mochtar Lubis bukan hanya pada institusi pemerintah tetapi dilakukan pula pada institusi pers, dapat dicermati dalam tajuk “Mentalitas Wartawan yang Bejat” karena terdapat media yang memuat berita yang tidak benar. Tajuk *Indonesia Raya* menulis sebagai berikut.

Kerusakan pada nilai-nilai kewartawanan yang dahulu dibuat oleh rezim Soekarno ternyata sampai kini belum sepenuhnya dapat diperbaiki. Pembuatan berita palsu mengenai percakapan yang tak pernah terjadi antara [Menteri Luar Negeri] Adam Malik dan Mochtar Lubis mengenai Pertamina adalah salah satu contoh terakhir (“Mentalitas Wartawan yang Bejat”, 29 Desember 1969).

4. Simpulan

Berdasarkan analisis data di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mochtar Lubis melalui bahasa kritik yang digunakannya hendak membangun transformasi komunikasi budaya kritik melalui penggunaan bahasa yang sederhana, terus terang, tidak ambigu, jauh dari eufemisme dan akronim yang dapat menyampaikan informasi secara jujur dan mewujudkan penggunaan bahasa yang jauh dari akar feodalisme. Karakter komunikasi kritik semacam inilah yang dikembangkan Mochtar Lubis yang dapat digambarkan melalui penggunaan kosakata, frasa, dan kalimat, baik dalam hal tingkat kekritisian maupun simbol kekritisian dengan analogi dan perumpamaan yang relevan dengan maksud agar kritik lebih memiliki daya sengar. Penggunaan analogi “republik pisang” dan “pengusaha oktopus” contoh frasa kritik ideomatik dan kosakata yang digunakan tampak sarkasme dan menunjukkan “kemarahan” seorang Mochtar Lubis, misalnya kosakata “negara garong”, “tauke” “penggarongan di siang bolong”, “gerombolan kaum koruptor”, “bandit”, dan “cukongisme”. Sementara konstruksi kalimat kritik yang digunakan berbentuk pasif, sehingga objek yang dikritik disebutkan secara terang. Konstruksi kritik seperti ini membutuhkan data dan fakta yang akurat agar terhindar dari fitnah dan kebohongan publik. Apabila dikaji berdasarkan relasi antara bahasa dan substansi kritik, Mochtar Lubis menggunakan konstruksi kritik pengalaman langsung dan contoh, konstruksi analogi, perbandingan, dan perumpamaan, konstruksi objek secara langsung, dan konstruksi *vis a vis* kritik. Semua konstruksi kritik tersebut bermuara pada kritik yang tajam, terang, dengan bahasa yang mudah dicerna.

Daftar Pustaka

- Anshori, D.S. 2017. *Analisis Wacana, Teori, Aplikasi, dan Pembelajaran*. Bandung: UPI Press.
- Atmakusumah dan Atmakusumah, S.R. 1997. *Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya, Seri 2 Korupsi dan Ekonomi, Pendidikan dan Generasi Muda, Hukum, dan ABRI*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Blum, W. 2013. *Demokrasi, Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Yogyakarta: Benteng.
- Dahlan, M.A. 1977. Sikap Pejabat Terhadap Kritik. *Jurnal Prisma*, vol. 6, (10), 14-21.
- Hill, D.T. 2011. *Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922- 2004), Sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Hodge, R. dan Kress, G. 1993. *Language as Ideology*. London: Routledge.
- Lubis, M. 1989. Media Massa dan Bahasa yang Terus Terang. *Jurnal Prisma*, Vol. 38 (1), 47-51.
- Sugono dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia.
- Semma, M. 2008. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Prilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Susanto, A.S. 1977. Makna dan Fungsi Kritik Sosial dalam Masyarakat dan Negara. *Jurnal Prisma*, vol. 6, (10), 3-13.
- Suprpto, R. A. 1989. Perubahan Sosial dan Perkembangan Bahasa. *Jurnal Prisma*, vol. 1, (18), 61-115.